

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 27 Juli 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

| A |   | BPK RI                                                                                                        |                           |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   | 1 | Manipulasi Perjalanan Dinas                                                                                   | <i>Koran Tempo/Hal.11</i> |
|   | 2 | Perjalanan Dinas Tetap Dipacu                                                                                 | <i>Koran Tempo/Hal.25</i> |
|   | 3 | Setelah 10 Tahun, Menpora RI Zainudin Berhasil ubah Kemenpora raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI | <i>Koran Tempo/Hal.3</i>  |
| B |   | Kota Cimahi                                                                                                   |                           |
|   | 1 | Tahun ini 8 Ruas Jalan Akan Diperbaiki                                                                        | <i>Galamedia/Hal.4</i>    |
| C |   | Kabupaten Bandung Barat                                                                                       |                           |
|   | 1 | Dana Perbaikan Jalan Tahun Depan Rp 285 Miliar                                                                | <i>Galamedia/Hal.6</i>    |

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Manipulasi Perjalanan Dinas

Entitas / Cakupan : BPK RI

Sumber / Hal : Koran Tempo/Hal.11

Edisi : Senin, 27 Juli 2020

## EDITORIAL

### Manipulasi Perjalanan Dinas

**P**ERSOALAN klasik dari tahun ke tahun: penyimpangan biaya perjalanan dinas aparat pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan lonjakan jumlah kasus penyelewengan ini pada tahun lalu. Pemerintah semestinya tidak memperbesar peluang penyelewengan dengan program rapat di luar kota yang kini digalakkan pada masa pandemi.

Menurut BPK, penyelewengan realisasi biaya perjalanan dinas pada 43 kementerian/lembaga sepanjang 2019 mencapai Rp 102,76 miliar. Temuan itu melonjak dari periode sebelumnya, 25,43 miliar. Bentuk penyimpangan itu antara lain perjalanan tanpa bukti pertanggungjawaban, manipulasi harga tiket, perjalanan dinas ganda, perjalanan dinas fiktif, dan kelebihan pembayaran.

Lembaga auditor negara itu setiap tahun selalu mengingatkan pemerintah agar meningkatkan pengawasan terhadap perjalanan dinas di semua instansi. Tapi penyalahgunaan terus terjadi. Kementerian yang disebutkan paling banyak temuan adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BPK mencatat modus penyimpangan antara lain menitipkan surat perintah perjalanan dinas. Tindakan manipulatif dan pemalsuan dokumen perjalanan semestinya diteruskan ke proses hukum. Para pelakunya seharusnya diajukan ke pengadilan untuk menimbulkan efek jera bagi aparat pemerintah lainnya.

Lebih jauh dari itu, pemerintah sudah saatnya mengkaji model pengukuran kinerja kementerian dan lembaga. Tingkat penyerapan dana anggaran sebagai basis penilaian kinerja banyak menimbulkan eksekusi negatif, termasuk berbagai penyimpangan. Rezim penilaian ini memberi insentif kepada lembaga dan kementerian yang berhasil menghabiskan dana anggaran setiap tahun. Sebaliknya, lembaga yang tingkat penyerapan anggarannya rendah mendapat disinsentif.

Model semacam itu membuat organ-organ pemerintah sering kali harus menciptakan program yang tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak. Apalagi, pada bulan-bulan menjelang akhir tahun. Perjalanan dinas ke luar kota dikebut demi menghabiskan dana anggaran. Penilaian sepatutnya didasarkan pada efisiensi: mereka yang bisa menciptakan program berdampak besar dengan biaya serendah mungkin layak mendapat apresiasi.

Efisiensi itu kini sangat diperlukan di tengah berbagai keterbatasan akibat pandemi. Pemerintah seharusnya menggunakan semua dana seefisien mungkin. Apalagi, pertumbuhan ekonomi sampai kuartal II masih minus hingga 5 persen dan masih akan berlanjut sampai akhir tahun.

Permintaan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi kepada enam kementerian dan lembaga agar menggenjot perjalanan dinas ke tujuh destinasi wisata tidak sesuai dengan semangat efisiensi itu. Kementerian pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut menganggap dana sekitar Rp 4 triliun bisa digunakan untuk menggerakkan wisata yang terpuak pandemi. Jika dijalankan, keputusan tersebut bisa jadi akan meningkatkan angka penyelewengan dana perjalanan dinas pada tahun ini.

Semua kementerian dan lembaga semestinya mengikuti keputusan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara yang mendorong pelaksanaan rapat secara daring. Pertemuan virtual ini, selain hemat dan produktif, aman dari bahaya penularan Covid-19 bagi pesertanya. Tentu saja, kemungkinan penyelewengan dana perjalanan dinas juga bisa ditekan. ●

Berita : Perjalanan Dinas Tetap Dipacu

Entitas / Cakupan : BPK RI

Sumber / Hal : Koran Tempo/Hal.25

Edisi : Senin, 27 Juli 2021

# Perjalanan Dinas Tetap Dipacu

Pemerintah diminta mempercepat penyerapan anggaran penanganan *corona*.

Suasana sepi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 9 Juli lalu.

hal darurat.”

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dalam realisasi belanja perjalanan dinas tahun ini. Pasalnya, sepanjang 2019, lembaga auditor itu telah menemukan adanya penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas pada 43 kementerian/lembaga senilai Rp 102,76 miliar. “Kalau ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan kelihatan di audit kami, dan pasti akan kami ungkap,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Apalagi tahun ini pemerintah menghadapi situasi pandemi yang menyedot kebutuhan anggaran cukup besar.

Kementerian Keuangan sebelumnya juga mengeluarkan arahan untuk mengutamakan pelaksanaan kegiatan aparat sipil negara (ASN) secara daring atau *online*, alih-alih melakukan kegiatan tatap muka dan perjalanan dinas. Ketentuan itu dirilis dalam surat bernomor S-

1200/AG.2020 yang diteken pada 19 Juli lalu. “Ini untuk mendukung standardisasi kegiatan daring kementerian/lembaga dalam menyesuaikan tugasnya di masa Covid-19,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. Dengan demikian, penyelenggaraan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai dengan prioritas dan urgensinya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics

(CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemerintah semestinya mengutamakan percepatan penyerapan anggaran belanja yang berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19. “Sesungguhnya itu lebih diharapkan demi membantu mengurangi penyebaran virus dan memulihkan perekonomian, bukan malah untuk perjalanan dinas ASN,” ucapnya.

● FRANSISCA CHRISTY ROSANA

## Diwarnai Penyimpangan

KEGIATAN perjalanan dinas mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Auditor negara ini menemukan penyimpangan dari realisasi perjalanan dinas tahun 2019 di 43 kementerian/lembaga senilai Rp 102,76 miliar. Adapun beban perjalanan dinas sepanjang tahun lalu mencapai Rp 46,03 triliun. Berikut ini rincian temuan tersebut.

| Permasalahan                                                                | Nilai           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Belum ada bukti pertanggungjawaban                                          | Rp 20,25 miliar |
| Harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya                             | Rp 9,5 miliar   |
| Perjalanan dinas rangkap                                                    | Rp 196,44 juta  |
| Perjalanan dinas fiktif                                                     | Rp 715,24 juta  |
| Belanja perjalanan dinas belum sesuai dengan ketentuan/kelebihan pembayaran | Rp 15,93 miliar |
| Penyimpanan perjalanan dinas lainnya                                        | Rp 55,16 miliar |

● GHOIDA RAHMAH | SUMBER: BPK

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berita            | : Setelah 10 Tahun, Menpora RI Zainudin Berhasil ubah Kemenpora raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI |
| Entitas / Cakupan | : BPK RI                                                                                                        |
| Sumber / Hal      | : Koran Tempo/Hal.3                                                                                             |
| Edisi             | : Senin,27 Juli 2022                                                                                            |

## Setelah 10 Tahun, Menpora RI Zainudin Berhasil Ubah Kemenpora Raih Opini Wajar

## Tanpa Pengecualian dari BPK RI

Opini WTP merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Laporan keuangan yang diberikan opini jenis ini menunjukkan bahwa auditor meyakini, berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Dan, walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Bagi Kemenpora, WTP kali ini merupakan perjuangan panjang selama kurang lebih 10 tahun. Terakhir kali opini WTP terukir pada 2009. Selanjutnya, berturut-turut Kemenpora hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ditambah lagi tahun 2015 dan 2016 mengalami keterpurukan dengan menyandang opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.

### Harus dipertahankan

Hasil memuaskan yang diraih Kemenpora RI atas predikat WTP menjadi hal yang harus terus dipertahankan dan menjadi tanggung jawab atas keuangan negara yang masuk dalam anggaran Kemenpora.

"Hasil ini menggembirakan



sekaligus menjadi tantangan kita untuk mempertahankan. Untuk meraih WTP adalah suatu usaha yang besar. Menurut saya, mempertahankan jauh lebih berat dan lebih besar terhadap *image* yang kurang baik di masyarakat tentang Kemenpora," ujar Menpora RI Zainudin Amali.

Menpora RI percaya, dengan menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dari tingkat pimpinan atas sampai staf paling bawah, publik akan menilai bahwa ternyata terjadi perubahan yang baik di Kemenpora. Menpora RI bersama jajarannya bertekad menggerakkan Kemenpora hingga lima tahun ke depan dengan lima program prioritas.

Program prioritas pertama yang menjadi konsentrasi menteri yang pernah menjabat sebagai Ketua

DPD Golkar Jawa Timur ini adalah Perbaikan Tata Kelola, yang selama ini menjadi kelemahan Kemenpora RI. Program prioritas kedua, ketiga dan keempat adalah tentang kepemudaan dan keolahragaan.

"Saya yakin jika tata kelolanya baik maka yang lain akan menjadi baik tapi jika tata kelolanya buruk maka pasti kegiatan dan program apa pun tidak akan menghasilkan hasil yang baik," ungkap Menpora RI dengan yakin.

Menpora RI juga melakukan *review* atas semua regulasi yang ada di kementerian yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan ini untuk mempercepat pelayanan publik. Kemenpora dulu lanjutnya, terkenal dengan pelayanan publik yang bertele-tele dan berbelit-belit sehingga harus diperbaiki.

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA  
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Berita            | : Tahun ini 8 Ruas Jalan Akan Diperbaiki |
| Entitas / Cakupan | : Kota Cimahi                            |
| Sumber / Hal      | : Galamedia/Hal.4                        |
| Edisi             | : Senin,27 Juli 2023                     |

**Wilman, "Menunggu Proses Lelang  
Tahun Ini 8 Ruas Jalan  
Akan Diperbaiki**

**CIMAHI, (GM).-**

Sebanyak delapan ruas jalan di Kota Cimahi akan diperbaiki tahun ini, dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 dari Kementerian Keuangan (Kemenuk) RI sekitar Rp 11 miliar lebih. Menunggu pelaksanaannya, saat ini tengah berlangsung proses lelang untuk pembangunannya.

Kedelapan ruas jalan yang akan diperbaiki tersebut adalah Jalan Pasir Kumeli, Jalan Karya Bakti, Rancabentang, Pakuhaji, Kebon Kopi, Cimenteng, Mahar Martanegara, dan Jalan Budi.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah mengatakan, proses lelang saat ini tengah dilakukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi secara online.

"Kita saat ini sudah mulai melaksanakan proses lelang, untuk pemeliharaan berkala di 8 ruas jalan di Kota Cimahi. Semuanya tersebar di 3 kecamatan," kata Wilman kepada "GM" melalui sambungan telepon, Ahad (26/7).

Pihaknya berharap, pelaksanaan proses lelang bisa selesai pada bulan Agustus mendatang, sehingga pengerjaan fisik bisa segera di-

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat



DARMA LEGU/GM

**PENGENDARA** melintasi jalan yang rusak di Kota Cimahi, beberapa waktu lalu. Sebanyak delapan ruas jalan di Kota Cimahi akan diperbaiki tahun ini, dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020.

lakukan oleh pemenang lelang.

"Bila proses lelang lancar, diproyeksikan pada bulan Desember harus sudah selesai. Makannya, kita ingin Agustus itu sudah ada pemenang lelang," ungkap Wilman.

Wilman menjelaskan, anggaran perbaikan delapan ruas jalan di Kota Cimahi itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 dari Kemenkeu RI yang besar bantu-

an anggarannya mencapai sekitar Rp 11 miliar lebih.

Menurutnya, anggaran sebesar itu dibagi untuk perbaikan jalan dengan nilai pagu yang berbeda-beda. Untuk pemeliharaan berkala Jalan Pasir Kumeli nilai pagu pakatnya mencapai Rp 1.202.567.000, dan Jalan Karya Bakti nilai pagu pakatnya Rp 1.188.678.000.

Kemudian Jalan Rancabentang ni-

lai pagu pakatnya mencapai Rp 1.028.973.000, Jalan Pakuhaji nilai pagu pakatnya mencapai Rp 1.245.762.000, Jalan Kebon Kopi nilai pagu pakatnya mencapai Rp 1.090.692.000, Jalan Cimenteng nilai pagunya Rp 2.136.691.000, Jalan Mahar Martanegara Rp 2.404.748.000, dan Jalan Budi Rp 1.174.181.000.

"Setiap jalan besaran anggarannya berbeda, tergantung panjang dan kondisi jalan," ucapnya.

### Sempat terhenti

Sebetulnya, tambah Wilman, ketika ada kebijakan refocusing dan re-alokasi anggaran untuk penanganan covid-19, DAK fisik untuk perbaikan jalan di Kota Cimahi sempat dihentikan. Namun, anggaran tersebut kembali diaktifkan dan bisa digunakan.

"Kita sudah terima kepastian, bahwa DAK fisik untuk bidang jalan bisa digunakan tahun ini," ujarnya.

Selain pemeliharaan jalan berkala, Wilman memastikan untuk pemeliharaan rutin tetap berjalan. Menurutnya, kondisi jalan di Kota Cimahi secara umum masih dalam kondisi baik.

"Untuk kondisi jalan di Cimahi sejauh ini melihat kemantapan jalan sudah 93 persen sampai tahun kemarin," pungkasnya. **(B.110)\*\***

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Berita            | : Dana Perbaikan Jalan Tahun Depan Rp 285 Miliar |
| Entitas / Cakupan | : Kabupaten Bandung Barat                        |
| Sumber / Hal      | : Galamedia/Hal.6                                |
| Edisi             | : Senin, 27 Juli 2024                            |

## Dana Perbaikan Jalan Tahun Depan Rp 285 Miliar

NGAMPRAH, (GM).-

Perbaikan infrastruktur jalan yang tertunda akibat pandemi Covid-19 rencananya dilanjutkan tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 285 miliar lebih dan bersumber dari pinjaman daerah Pemkab Bandung Barat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Mestinya pelaksanaan proyek yang didanai dari pinjaman tersebut sudah dimulai tahun ini. Namun karena terjadi pandemi Covid-19, perbaikan tak jadi dilaksanakan.

"Ya, kemungkinan digeser ke tahun depan," kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat, Aan Sopian, Ahad (26/7).

Ia menambahkan, meski kemungkinan besar perbaikan jalan akan dilaksanakan tahun depan, namun tidak mengubah ruas yang sudah direncanakan pada 2020. "Yang digeser hanya waktu pelaksanaannya, ruasnya tetap sama dengan perencanaan tahun ini," tandasnya.

Sesuai rencana awal, lanjut Aan, ruas jalan yang diperbaiki sepanjang 52 kilometer di wilayah selatan. Selain itu digunakan untuk membangun Jembatan Rp 197 miliar.

Diungkapkan-nya, ruas jalan yang diperbaiki meliputi Jalan Selacau-Cililin, Cililin-Sindangkerta, Sindangkerta-Celak, Celak-Gununghalu, Bunijaya-Cilangari, Cilangari-Cisokan, dan pembangunan Jembatan Tajim.

**Perkuat selatan**  
Secara terpisah tokoh masyarakat Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Beben mendorong Bupati Aa Umbara dan Wakil

”  
Yang digeser hanya waktu pelaksanaannya, ruasnya tetap sama dengan perencanaan tahun ini.

”  
**AAN SOPIAN**

Kabid Jalan dan Jembatan  
Dinas PU dan PUPR KBB

Bupati Hengki Kurniawan untuk memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang layak dan kuat sehingga peningkatan ekonomi di wilayah selatan bisa lebih cepat.

"Masa bakti bupati dan wakil bupati itu sangatlah singkat, hanya lima tahun. Oleh karena itu, warga yang tinggal di selatan harus terus mendorong agar kebijakan yang diambil pemerintah betul-betul berpihak kepada rakyat, salah satunya terkait infrastruktur jalan," kata Beben yang merupakan mantan Kepala Desa Batulayang ini.

Ia mengingatkan agar semua proyek pembangunan infrastruktur jangan sampai ada yang ditunda-tunda. Jika memang anggarannya kurang memadai alangkah lebih baik memangkas kegiatan yang sifatnya seremonial.

"Jika wabah corona berlalu dan roda pemerintahan kembali berjalan, tolong program pembangunan infrastruktur untuk wilayah selatan tetap menjadi prioritas utama," haranya.

Sebelumnya, Direktur PT SMI Darwin Krisna Djayawinata menerangkan sesuai kesepakatan dengan Pemkab Bandung Barat jangka waktu pinjaman selama tiga tahun. Dengan suku bunga pinjaman 6,26 persen per tahun.

"Jika dibandingkan dengan 63 kabupaten/kota dan provinsi yang sudah lebih dulu memanfaatkan dana pinjaman dari PT SMI, suku bunga yang diberikan kepada Pemkab Bandung Barat relatif lebih kecil. Dengan jangka waktu pinjaman tiga tahun, maka bunga dan pokok pinjamannya sebesar Rp 95 miliar per tahun," kata Darwin.

Ia mengungkapkan, di Jawa Barat baru Kabupaten Bandung Barat yang sudah memanfaatkan fasilitas pembiayaan. PT SMI merupakan lembaga keuangan bukan perbankan milik pemerintah di bawah Kementerian Keuangan.

"Tujuan dari fasilitas pembiayaan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita berharap Kabupaten Bandung Barat juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Bahkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," paparnya. (B.104)\*\*